

SINERGISITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENURUNAN STUNTING DI DESA KARYA MULYA KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021-2022

SYNERGY OF LOCAL GOVERNMENT IN REDUCING STUNTING IN KARYA MULYA VILLAGE ROKAN HULU REGENCY 2021-2022

Muhammad Reski^{1)*}, Wan Asrida²⁾

^{1)*} Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau, muhammad.reski0593@student.unri.ac.id

²⁾ Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau, wan.asrida@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya prevalensi stunting di Desa Karya Mulya yang memerlukan sinergi efektif antar pemangku kepentingan, dimana kondisi aktual menunjukkan implementasi program masih menghadapi kendala signifikan dibandingkan dengan kondisi ideal yang menuntut kolaborasi optimal sesuai teori sinergisitas Covey. Tujuan penelitian adalah menganalisis sinergisitas penurunan stunting dan mengidentifikasi faktor penghambat serta pendukungnya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Miles dan Huberman melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi di instansi terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dibentuk, efektivitas program terhambat oleh empat masalah utama: ketidakhadiran BPKD dalam koordinasi anggaran, keterbatasan kapasitas kader posyandu, implementasi Peraturan Bupati yang belum merata, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program intervensi gizi. Simpulan penelitian menekankan bahwa meskipun kerangka kebijakan sinergisitas telah terbangun dengan baik, implementasinya di lapangan belum optimal sehingga diperlukan beberapa rekomendasi strategis berupa integrasi BPKD ke dalam struktur TPPS, penguatan kapasitas kader melalui pelatihan berkelanjutan, digitalisasi sistem pemantauan dan evaluasi, serta penerapan evaluasi berbasis outcome secara berkala untuk memastikan pencapaian target penurunan stunting yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Sinergisitas, Stunting, Koordinasi, Partisipasi Masyarakat, Evaluasi Outcome

ABSTRACT: This study was motivated by the high prevalence of stunting in Karya Mulya Village, which requires effective synergy among stakeholders. The actual conditions show that program implementation still faces significant obstacles compared to the ideal conditions that demand optimal collaboration according to Covey theory of synergy. The purpose of this study is to analyze the synergy of stunting reduction and identify its inhibiting and supporting factors using a descriptive qualitative method with the Miles and Huberman approach through in-depth interviews and documentation studies at relevant agencies. The results of the study reveal that although the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) has been formed, the effectiveness of the program is hampered by four main problems: the absence of BPKD in budget coordination, limited capacity of posyandu cadres, uneven implementation of Regent Regulations, and low community participation in nutrition intervention programs. The study concluded that although a synergistic policy framework has been well established, its implementation in the field has not been optimal. Therefore, several strategic recommendations are needed, including the integration of the BPKD into the TPPS structure, capacity building for cadres through continuous training, digitization of the monitoring and

evaluation system, and the implementation of periodic outcome-based evaluations to ensure the achievement of sustainable stunting reduction targets.

Keywords: Synergy, Stunting, Coordination, Community Participation, Outcome Evaluation

A. PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah kesehatan yang masih marak terjadi di Indonesia. *Stunting* sendiri merupakan suatu kondisi dimana berat dan tinggi badan anak masih kurang mencukupi untuk usianya, dan keadaan ini terjadi pada saat anak berusia 2 tahun, yang menandakan kurangnya nutrisi yang tepat dalam waktu yang lama (Intan et al., 2023). Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Pasal 1 No 1, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Rianggara & Wicaksono, 2024). Kondisi ekonomi dan kesulitan yang disebabkan akses ke layanan kesehatan, kurangnya air bersih dan sanitasi yang tidak sehat. Dampak dari gangguan dalam masa bayi & anak, khususnya *Stunting* bisa mengakibatkan gangguan perkembangan kognitif & meningkatnya risiko terhadap penyakit infeksi & lebih lanjut kematian. *Stunting* disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *Stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dari anak balita (Neherta, 2023).

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah malnutrisi dan stunting karena jika tidak ditangani, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta memperlebar ketimpangan sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, seluruh tingkatan pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa wajib berperan aktif dalam upaya penurunan stunting (Rianggara & Wicaksono, 2024). Di tingkat lokal, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2021 menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab strategis dalam konvergensi pencegahan stunting, antara lain dengan menetapkan kewenangan desa untuk mendukung intervensi gizi terintegrasi, mengalokasikan dana desa bagi program stunting, memberdayakan Kader Pembangunan Manusia (KPM), meningkatkan layanan gizi dan penyuluhan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pencegahan dan penurunan stunting.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI) Tahun 2021-2024. RAN PASTI merupakan panduan penurunan *Stunting* khususnya untuk diterapkan oleh pemangku kepentingan atau pihak terkait di tingkat daerah. RAN PASTI apabila diterapkan secara nasional di seluruh daerah di Indonesia, maka akan membawa dampak signifikan untuk mencapai target penurunan *Stunting* yang telah ditetapkan Presiden. RAN PASTI tersebut mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* terkait hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI) Tahun 2021-2024 BAB II Pasal 4 Ayat 1 dan 2.

Prevalensi stunting di Provinsi Riau masih tergolong tinggi meskipun sudah menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, rata-rata prevalensi stunting di Riau mencapai 23,3%, kemudian menurun menjadi 17% pada tahun 2022 (Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2023). Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu daerah dengan

angka stunting yang cukup tinggi, yaitu 25,8% pada tahun 2021 dan 22% pada tahun 2022, sehingga ditetapkan sebagai lokus prioritas penanganan stunting di Provinsi Riau. Secara internal, Rokan Hulu sebenarnya telah mengalami penurunan cukup besar dari 58,9% pada tahun 2017 menjadi 22% pada tahun 2022, namun capaian ini masih belum sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Bappeda Rokan Hulu, 2023). Salah satu wilayah dengan angka stunting tertinggi adalah Kecamatan Rambah Samo, khususnya Desa Karya Mulya yang mencatat prevalensi sebesar 12,8% pada tahun 2022 (Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2023).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, seperti penetapan 31 desa lokus intervensi, pelaksanaan program gizi dan sanitasi terpadu, serta penguatan peran kader posyandu di tingkat lokal. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya anggaran khusus stunting, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, implementasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting juga belum berjalan optimal karena masih lemahnya dukungan sumber daya manusia dan sistem pelaporan data (Bappeda Rokan Hulu, 2023). Sebagai acuan nasional, Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten/Kota dari Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor, pengumpulan data terintegrasi, serta evaluasi berkala dalam pencegahan stunting. Namun, di tingkat pelaksanaan, terutama di daerah seperti Rokan Hulu, penerapan pedoman ini masih menemui hambatan teknis dan koordinatif (KPPN/ BPPN, 2019).

Teori sinergisitas yang diungkapkan oleh Covey (dalam Utami, 2019) menjelaskan bahwa hasil yang dicapai melalui kerja sama berbagai pihak akan lebih besar dibandingkan hasil kerja individu atau lembaga yang berjalan sendiri-sendiri. Dalam kebijakan publik, sinergisitas berarti adanya kolaborasi harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif (Setiawan, 2023). Prinsip ini sangat relevan dalam penanganan stunting karena permasalahan gizi tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu sektor, melainkan membutuhkan dukungan lintas bidang seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan sosial. Penelitian oleh Lestari, (2025) menunjukkan bahwa sinergisitas antarorganisasi perangkat daerah dan peran aktif pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program penurunan stunting. Sementara Setiawan & Indriani, (2025) menegaskan bahwa semakin kuat koordinasi dan kolaborasi antar pihak, semakin efektif pula pelaksanaan intervensi gizi dan perubahan perilaku di masyarakat. Dengan demikian, penerapan teori sinergisitas menjadi landasan penting dalam membangun sistem penanganan stunting yang terpadu dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program penurunan stunting di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo, dengan melihat peran pemerintah desa, keterlibatan masyarakat, dan efektivitas koordinasi lintas sektor. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi strategi agar program penurunan stunting di desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Alasan memilih masalah ini adalah karena stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan anak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan (Kemenkes RI, 2021). Desa Karya Mulya dipilih karena meskipun telah menjadi lokus intervensi selama beberapa tahun, angka stunting di wilayah ini masih cukup tinggi. Dengan meneliti pelaksanaan program di tingkat desa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program penurunan stunting, baik di Kabupaten Rokan Hulu maupun di Provinsi Riau secara umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam sinergisitas antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Desa Karya Mulya dalam penanganan stunting. Menurut Saryono (dalam Fadli, 2021), penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki dan menjelaskan fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo, dengan alasan bahwa desa ini merupakan lokus stunting hingga tahun 2023, menunjukkan peningkatan prevalensi, serta memiliki keterbukaan dari pihak desa terhadap kegiatan penelitian. Jenis data yang digunakan meliputi data primer (hasil wawancara dengan informan kunci seperti aparat desa, petugas kesehatan, kader posyandu, dan pejabat kabupaten) dan data sekunder (dokumen resmi, laporan, dan data statistik terkait angka stunting serta anggaran desa). Informan dipilih dengan teknik snowball sampling, yakni berdasarkan rekomendasi dan keterlibatan langsung dalam program penurunan stunting. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (dalam Mardawati, 2020) yang meliputi empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya sinergis lintas sektor dalam menurunkan angka stunting di Desa Karya Mulya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penurunan *Stunting* di Kabupaten Rokan Hulu menghadapi tantangan kompleks dalam implementasi kebijakan. Meski telah memiliki payung hukum melalui Perpres No. 72/2021 dan Perbup No. 2/2021, sinkronisasi program lintas sektor masih belum optimal. Data menunjukkan fluktuasi prevalensi *Stunting* yang tidak konsisten, mengindikasikan lemahnya koordinasi antar-OPD seperti Dinas Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat. Tantangan utama terletak pada disparitas alokasi anggaran, dimana hanya 20% APBDes di Desa Karya Mulya yang secara spesifik dialokasikan untuk intervensi *Stunting*, serta belum terintegrasinya sistem data elektronik antar-instansi.

Kabupaten Rokan Hulu telah mengembangkan sistem penurunan *Stunting* yang holistik melalui kolaborasi lintas sektor. Berbagai dinas terkait seperti Kesehatan, KB, Sosial, BAPPEDA, dan Diskominfo bersinergi dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) untuk melaksanakan intervensi terpadu. Pendekatan ini mencakup dua aspek utama: intervensi spesifik berupa layanan kesehatan dan gizi, serta intervensi sensitif melalui program pemberdayaan sosial ekonomi.

Implementasi di lapangan difokuskan pada pendampingan keluarga oleh kader desa, edukasi masyarakat melalui kelompok remaja dan kader kesehatan, serta distribusi bantuan langsung seperti paket gizi dan suplemen. Pemerintah daerah juga giat melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselarasan program dan optimalisasi anggaran. Kendala seperti disparitas kualitas program antardaerah dan tantangan koordinasi tetap menjadi perhatian, namun komitmen kuat dari pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi modal penting dalam upaya penurunan *Stunting* ini. Melalui model kolaboratif ini, Kabupaten Rokan Hulu berupaya menciptakan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang.

1. Komunikasi Yang Efektif Dinas Terkait Penurunan *Stunting*

Komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam percepatan penurunan stunting diwujudkan melalui penyelenggaraan Rembuk Stunting yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, menyusun rencana aksi terpadu, dan membangun komitmen bersama dalam implementasi program

penurunan stunting. Sebagaimana tercermin dalam dokumentasi kegiatan tahun 2022 berikut, Rembuk Stunting dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Bappeda, aparat keamanan, dan kejaksaan, yang menandakan pendekatan multisektor yang komprehensif. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai media koordinasi formal, tetapi juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar-sektor untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting di wilayah tersebut.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Rembuk Stunting Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

Sumber: Media Center Kabupaten Rokan Hulu, 2022

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Rokan Hulu, ditemukan bahwa upaya penurunan stunting melibatkan berbagai dinas dengan pembagian peran yang jelas. Dinas Sosial memfokuskan pada pendekatan dampak sosial, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zul Asri: "*Kalau kita lebih mengarah ke dampak sosial. Dinas KB sebagai leading factor.*" Meskipun bukan leading sector, Dinas Sosial aktif dalam mengidentifikasi keluarga rentan melalui program bantuan sosial dan melakukan pendampingan keluarga untuk memastikan akses layanan gizi dan kesehatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) berperan sebagai leading factor dalam penurunan stunting. Menurut Bapak Gusnar, Dinas KB mengkoordinasikan perubahan perilaku dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa. Mekanisme formalnya dijelaskan: "*Desa meng SK kan sebanyak 3 orang dalam satu tim. Setelah ditunjuk oleh desa, maka Dinas KB melalui BKKBN mengadakan pelatihan untuk seluruh TPK se Kabupaten.*" Struktur tim penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu terbagi dalam empat bidang koordinator yang terorganisir dengan baik. Masing-masing bidang memiliki fokus berbeda, mulai dari tindakan sensitif-spesifik yang dikelola Dinas Kesehatan, perubahan perilaku oleh Dinas KB, konvergensi perencanaan oleh BAPPEDA, hingga data dan evaluasi oleh Diskominfo. Pembagian peran ini memastikan bahwa intervensi stunting tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup perubahan perilaku melalui penyuluhan dan pendampingan.



Gambar 3. Siaran Pers Kegiatan Rembuk Stunting Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Sumber: Media Center Kabupaten Rokan Hulu, 2023

BAPPEDA memegang peran kunci dalam integrasi program stunting ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Bapak Febri Ferika menjelaskan: "BAPEDA tugasnya mengumpulkan semua usulan, misalnya dari MUSREMBANG, usulan teknokratik, atau pemangku kepentingan. Nanti disusun jadi RKPD dengan target indikator penurunan Stunting." Proses ini menunjukkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam menyusun rencana pembangunan. Namun, penelitian mengungkap adanya tantangan dalam koordinasi antar dinas, khususnya dalam mekanisme penganggaran. Bapak Febri Ferika mengungkapkan kompleksitas yang dihadapi: "*Mulai ke Bapeda, ke Dalu KB, tetapi yang anehnya tetap Bapeda disuruh melakukan intervensi anggaran... anggaran itu bukan di Bapeda lagi, di BPKAD.*" Kondisi ini menciptakan dualisme dalam proses pengelolaan keuangan yang berpotensi menghambat efektivitas program.

Saat pelaksanaannya, komunikasi formal menjadi tulang punggung koordinasi antardinas. Bapak Gusnar menjelaskan frekuensi rapat koordinasi: "*Rapat koordinasi kita ada melakukan 4 kali dalam setahun berupa rapat tim kabupaten dengan mengundang sebanyak 13 dinas yang berhubungan dengan Stunting.*" Rapat ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan menyusun strategi bersama. Di sisi lain, komunikasi informal ternyata memainkan peran yang tidak kalah penting. Bapak Gusnar mengakui efektivitas pendekatan melalui jejaring sosial yang sudah terbangun: "*Kawan-kawan di PKK itu yang dekat dengan masyarakat. Untuk sosialisasi dan pengadaan kegiatan, ya melalui mereka. Mereka yang tahu persis kondisi di lapangan.*" Komunikasi informal ini memungkinkan informasi terkait program stunting lebih mudah diterima masyarakat.

Keterlibatan multipihak dalam penurunan stunting diwujudkan melalui kegiatan Rembuk Stunting yang dilaksanakan secara berkala, seperti yang terdokumentasi dalam Gambar 3.1 dan 3.2. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, OPD, hingga lembaga non-pemerintah dan akademisi. Partisipasi swasta juga berkontribusi signifikan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, dana CSR untuk program stunting mencapai Rp1,65 miliar yang bersumber dari lima perusahaan kelapa sawit di wilayah tersebut. Kontribusi ini digunakan untuk mendukung program pendidikan dan kesehatan dalam upaya penurunan stunting. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu sangat bergantung pada sinergi antara komunikasi formal dan informal, serta koordinasi yang solid antar berbagai pemangku kepentingan. Meskipun telah memiliki struktur yang terorganisir, tantangan dalam integrasi data dan mekanisme penganggaran masih perlu menjadi perhatian untuk optimalisasi program di masa depan.

2. Komunikasi Yang Efektif Dinas Terkait Penurunan Stunting

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Rokan Hulu, implementasi umpan balik langsung dalam penanganan stunting dilakukan melalui berbagai program bantuan dan intervensi gizi yang melibatkan multiple sektor. Dinas Kesehatan memegang peran sentral dalam intervensi spesifik, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Febri Ferika S.P.: "*Intervensi spesifik itu tugas fungsinya dinas kesehatan. Baik itu remaja putri diberi tablet tambah darah, diukur lingkar lengan, anemia dan sebagainya. Sudah itu ibu hamil, pasangan usia subur. Sudah itu pasangan mau nikah itu diukur tuh kesehatannya oleh dinas kesehatan.*" Program ini mencakup seluruh siklus kehidupan mulai dari remaja putri, calon pengantin, hingga ibu hamil, dengan kolaborasi lintas sektor termasuk Kementerian Agama dalam bimbingan calon pengantin.



Gambar 4. Siaran Pers Kegiatan Pemberian Bantuan Paket Makanan Pada Anak yang berisiko Stunting di Desa Karya Mulya 2023

Sumber: Media Center Kabupaten Rokan Hulu, 2023

Dukungan infrastruktur kesehatan juga menjadi perhatian serius, dimana seluruh puskesmas dan posyandu telah dilengkapi dengan alat antropometrik standar WHO. "Kita seluruh puskesmas dapat bantuan antropometrik dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Alat ukur standar WHO itu satu set, ada timbangan, ada alat ukurnya... Tahun 2023 seluruh posyandu dapat bantuan ini." Penyediaan alat ukur yang standar ini memastikan akurasi dalam pemantauan status gizi balita. Di tingkat desa, pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting telah diatur dalam Perbub Nomor 2 Tahun 2021, yang memungkinkan alokasi dana untuk pembelian alat antropometrik, pemberian makanan tambahan, dan honor kader posyandu.



Gambar 5. Siaran Pers Kunjungan dan Pemantauan Langsung Dari Jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 2023

Sumber: Media Center Kabupaten Rokan Hulu, 2023

Sementara itu, Dinas Sosial berfokus pada pendekatan non-fisik melalui program pendampingan. Bapak Zul Asri menjelaskan: "Kita Dinas Sosial belum ada bantuan yang harus diberikan kepada masyarakat seperti upaya pencegahannya... arahannya kalau dari Dinas Sosial ini lebih kepada pendampingan karena kawan-kawan yang di PKH itu mereka yang dekat dengan masyarakat." Pendekatan ini melengkapi intervensi teknis kesehatan dengan membangun kesadaran masyarakat dan memfasilitasi akses layanan. Dokumentasi kegiatan pada Gambar 3.4 dan 3.5 menunjukkan implementasi nyata program tersebut, dimana terlihat pemberian bantuan paket makanan bagi anak berisiko stunting serta kunjungan pemantauan langsung oleh jajaran pemerintah. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk intervensi langsung, tetapi juga media untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat pendekatan partisipatif dalam penanganan stunting.



Gambar 6. Implementasi Program Pengentasan Stunting di Desa Karya Mulya

Sumber: Axial Code Hasil Wawancara, 2024

Bagan ini menggambarkan implementasi program penanganan stunting di Desa Karya Mulya yang mencakup tiga aspek utama: pendampingan keluarga oleh kader Posyandu sebagai upaya deteksi dini dan pemantauan berkala, distribusi makanan tambahan bergizi untuk intervensi langsung masalah gizi balita, serta kendala dalam pelaksanaan penyuluhan gizi oleh Puskesmas akibat ketidakpastian alokasi dana dari pemerintah kabupaten. Gambaran ini menunjukkan bahwa meskipun program pendampingan dan distribusi makanan berjalan, efektivitas program secara keseluruhan masih terhambat oleh masalah pendanaan yang mengakibatkan penyuluhan gizi sebagai komponen kunci perubahan perilaku tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Tantangan ini mengindikasikan perlunya perbaikan sistem penganggaran dan koordinasi yang lebih baik antara tingkat desa dan kabupaten untuk memastikan kelancaran seluruh komponen program penanganan stunting.

3. Kepercayaan Terhadap Pemerintah Terkait Penurunan *Stunting*

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karya Mulya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam program penurunan stunting menunjukkan tren yang positif. Hal ini tercermin dari respons penerima bantuan yang sangat antusias terhadap berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Zul Asri: "*Penyaluran bantuan intervensi stunting dilakukan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan proses penyerahannya selalu disaksikan oleh Kepala Desa. Mengenai respons, sejauh ini penerima bantuan menunjukkan reaksi yang sangat positif. Hal ini karena mayoritas penyandang stunting di desa tersebut tergolong sebagai keluarga yang berkekurangan.*" Pernyataan ini mengindikasikan bahwa transparansi dalam penyaluran bantuan dan ketepatan sasaran menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam penanganan stunting tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan, tetapi juga melalui pendampingan dan pengawasan langsung di lapangan. Kunjungan dan pemantauan langsung dari jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam kegiatan layanan kesehatan kepada balita dan ibu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah. Hadirnya pejabat daerah bersama petugas kesehatan dan ibu balita menunjukkan sinergi antara pemerintah dan tenaga medis dalam memberikan layanan gizi dan kesehatan secara menyeluruh. Kehadiran aparat pemerintah di lapangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan program, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.

Tabel 1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Program Penurunan Stunting

Aspek Penilaian	Tingkat Kepercayaan	Bukti/Faktor Pendukung
Ketepatan Sasaran	Tinggi	Penerima bantuan berasal dari keluarga benar-benar membutuhkan
Transparansi Penyaluran	Sangat Tinggi	Proses penyerahan disaksikan langsung oleh Kepala Desa
Kualitas Bantuan	Tinggi	Bantuan sesuai kebutuhan (sembako, vitamin, alat kesehatan)
Pendampingan Program	Cukup Tinggi	Kunjungan rutin petugas kesehatan dan pendamping desa
Kelengkapan Layanan	Tinggi	Keterlibatan 12 OPD dengan program spesifik masing-masing
Responsivitas Keluhan	Cukup Tinggi	Mekanisme pengaduan melalui kader posyandu dan kepala desa

Sumber: (Data Primer dan Sekunder Peneliti, 2025)

Bentuk kepercayaan masyarakat juga terlihat dari partisipasi aktif dalam berbagai program yang diselenggarakan. Seperti diungkapkan oleh Bapak Suwarno, Kepala Desa Karya Mulya: "*Desa Karya Mulya sendiri menerima bantuan tersebut bukan berupa bantuan dana namun bantuan tersebut berupa barang, fasilitas-fasilitas pendukung sesuai tupoksi dinas-dinas yang terkait.*" Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Keterlibatan 12 dinas terkait dengan program yang saling melengkapi menunjukkan komitmen holistik pemerintah dalam menangani stunting dari berbagai aspek.

Faktor-faktor yang mendukung tingginya tingkat kepercayaan masyarakat antara lain: konsistensi program dari tahun ke tahun, keterbukaan dalam mekanisme penyaluran bantuan, serta keberpihakan yang jelas kepada keluarga kurang mampu. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal responsivitas terhadap keluhan masyarakat dan pendampingan berkelanjutan. Kepercayaan yang telah terbangun ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi keberlanjutan program penurunan stunting di masa mendatang, sekaligus mencerminkan efektivitas governance dalam pelayanan publik di sektor kesehatan.

4. Kreativitas Pemerintah dalam Penanganan Stunting

Kreativitas yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun Perbup Stunting 2024 merupakan perwujudan nyata dari teori sinergi Stephen Covey. Esensi sinergi Covey adalah menciptakan nilai tambah di mana hasil kolaborasi jauh lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya, yang tercapai melalui pemaduan perspektif berbeda menjadi solusi baru yang inovatif (Almakki, Hidayat, Harmanto, & Fanida, 2025). Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang secara kreatif tidak menciptakan program baru dari nol, tetapi menghubungkan elemen-elemen yang sudah ada seperti program BPJS, ODF, dan berbagai dinas ke dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi. Pendekatan ini mengakomodir konvergensi multisektor, mencerminkan prinsip Covey, di mana kekuatan dan peran masing-masing sektor diakui dan dipertemukan untuk menghasilkan dampak yang lebih powerful, yaitu percepatan penurunan stunting, yang tidak mungkin dicapai oleh satu sektor saja.

Kreativitas dalam penanganan stunting di Kabupaten Rokan Hulu tercermin melalui kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan pendekatan baru dengan menghubungkan berbagai elemen yang sudah ada menjadi kebijakan yang lebih terintegrasi. Salah satu bentuk kreativitas tersebut diwujudkan melalui Peraturan Bupati (Perbub) Stunting 2024 yang mengakomodir konvergensi multisektor. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Febri Ferika S.P.: "*Perbub Stunting 2024 sudah mengakomodir konvergensi multisektor termasuk BPJS dan ODF (Open Defecation Free). Ini langkah bagus, tapi implementasinya harus dipantau, terutama sinkronisasi anggaran antar dinas.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan telah dilakukan, namun memerlukan monitoring ketat dalam implementasinya.

Kreativitas dalam penanganan stunting di Kabupaten Rokan Hulu tercermin melalui kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan pendekatan baru dengan menghubungkan berbagai elemen yang sudah ada menjadi kebijakan yang lebih terintegrasi. Salah satu bentuk kreativitas tersebut diwujudkan melalui Peraturan Bupati (Perbub) Stunting 2024 yang mengakomodir konvergensi multisektor. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Febri Ferika S.P.: "*Perbub Stunting 2024 sudah mengakomodir konvergensi multisektor termasuk BPJS dan ODF (Open Defecation Free). Ini langkah bagus, tapi implementasinya harus dipantau, terutama sinkronisasi anggaran antar dinas.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan telah dilakukan, namun memerlukan monitoring ketat dalam implementasinya.

Tabel 2. Coding Tematik Hasil Wawancara Kreativitas Pemerintah Rokan Hulu dalam Pengentasan Stunting

Bentuk Inovasi	Pelaku Utama	Implementasi
Perbub Stunting 2024	BAPPEDA	Konvergensi multisektor (BPJS, ODF)
Revisi Kelembagaan TPPS	BPKD, BAPPEDA	Integrasi koordinator anggaran
Kolaborasi Legislatif-Eksekutif	DPRD, Pemda	Rapat dengar pendapat, konsultasi
Program Makanan Bergizi	Dinas Pendidikan	Implementasi program pusat di daerah
Pendekatan Multidimensi	Multi-OPD	Integrasi gizi, sanitasi, lingkungan

Sumber (Hasil Wawancara Peneliti, 2025)

Dukungan politik dan kolaborasi antar lembaga juga menjadi bentuk kreativitas dalam tata kelola penurunan stunting. Bapak Romi Juliandra, S.E., Anggota DPRD Rokan Hulu menyatakan: "*Pada prinsipnya DPRD itu berkolaborasi membangun daerah bersama pemerintah daerah... DPRD selalu melakukan pertemuan baik rapat dengar pendapat, maupun rapat konsultasi.*" Bentuk kolaborasi ini memperkuat legitimasi politik dan komitmen bersama dalam penanganan stunting. Inovasi program juga diwujudkan melalui adaptasi program nasional ke tingkat daerah. Bapak Romi Juliandra merekomendasikan: "...rekomendasinya semoga program yang digagas oleh pemerintah pusat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tentang makanan bergizi bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Rokan Hulu, dengan baik oleh dinas terkaitnya, yaitu dinas pendidikan." Rekomendasi ini menunjukkan kemampuan dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan implementasi lokal.

Pendekatan multidimensi yang kreatif juga tercermin dalam pemahaman komprehensif tentang determinan stunting: '*Jadi Stunting itu salah satu banyak upaya bisa dilakukan pemberian makanan bergizi, kemudian di rumah itu sarana -persarana kebersihannya harus cukup, standar WC nya harus bagus, kemudian di lingkungannya harus punya lingkungan itu*

harus punya parit..." Pernyataan ini menunjukkan pemahaman holistik bahwa stunting tidak hanya masalah gizi tetapi juga terkait sanitasi dan lingkungan. Dengan berbagai inovasi dan kreativitas tersebut, Kabupaten Rokan Hulu telah menunjukkan komitmen dalam mengembangkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk percepatan penurunan stunting, meskipun tantangan implementasi masih perlu menjadi perhatian serius.

Analisis Sinergisitas Pemerintah Daerah dalam Pengentasan *Stunting* di Desa Karya Mulya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2022

Berdasarkan analisis terhadap implementasi 8 petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Rokan Hulu, ditemukan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan dan program, namun masih terdapat tantangan signifikan dalam hal integrasi dan koordinasi lintas sektor. Teori sinergisitas menurut Covey (dalam Daniel, 2024) menegaskan bahwa kolaborasi efektif memerlukan keselarasan tujuan dan mekanisme koordinasi yang solid, yang dalam konteks Rokan Hulu masih perlu diperkuat. Penelitian Lestari, (2025) mengkonfirmasi bahwa keberhasilan program stunting sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan koordinasi yang masih menjadi tantangan di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan identifikasi sebaran stunting dan ketersediaan program, Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan 31 desa lokus prioritas, termasuk Desa Karya Mulya. Namun, temuan penelitian mengungkap bahwa integrasi program masih menghadapi kendala koordinasi substantif, sebagaimana diungkapkan Bapak Febri Ferika mengenai perlunya sinkronisasi anggaran antar dinas. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya sistem pengelolaan data stunting, dimana data EPPGBM dari posyandu belum dapat digunakan secara maksimal akibat tiga masalah fundamental: alat tidak standar, kompetensi kader yang kurang, dan distribusi posyandu yang tidak merata.

Penyelenggaraan Rembuk Stunting sebagai forum koordinasi multisektor telah dilaksanakan secara konsisten, namun efektivitasnya dalam menghasilkan tindak lanjut konkret masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan temuan Setiawan & Indriani, (2025) yang menekankan pentingnya mekanisme follow-up yang jelas dalam setiap forum koordinasi. Di tingkat desa, meskipun Perbup Nomor 2 Tahun 2021 telah memberikan kepastian hukum, implementasinya masih menghadapi kendala dalam hal konsistensi komitmen kepala desa dan kapasitas kader dalam melaksanakan pendampingan keluarga. Sistem pengukuran pertumbuhan dan publikasi angka stunting juga masih menghadapi tantangan standarisasi. Fluktuasi prevalensi stunting di Desa Karya Mulya dari 12% (2020) menjadi 16% (2021) dan 12.8% (2022) mengindikasikan perlunya sistem pemantauan yang lebih konsisten dan terstandarisasi. Kondisi ini diperburuk dengan belum optimalnya mekanisme review kinerja program yang masih terfragmentasi dan belum berbasis outcome, sebagaimana dikritisi oleh Bapak Febri Ferika mengenai perlunya revisi kelembagaan TPPS dengan melibatkan BPKD sebagai koordinator anggaran.

Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pedoman teknis penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu telah menunjukkan kemajuan dalam aspek regulasi dan kelembagaan, namun masih memerlukan perbaikan signifikan dalam hal integrasi program, sinkronisasi anggaran, dan penguatan sistem data. Pendekatan sinergis yang holistik dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pencapaian target penurunan prevalensi stunting di wilayah ini. Untuk mempercepat pencapaian target penurunan stunting, diperlukan intervensi strategis yang meliputi: penguatan sistem koordinasi melalui integrasi BPKD dalam TPPS, standardisasi sistem data dengan penerapan teknologi digital, peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan mekanisme evaluasi berbasis outcome, serta optimalisasi peran desa melalui pendampingan intensif (Agustina, 2019). Dengan implementasi rekomendasi ini secara konsisten, diharapkan

efektivitas program penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu dapat ditingkatkan secara signifikan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian sinergisitas Pemerintah Daerah dalam penurunan stunting di Desa Karya Mulya, Kabupaten Rokan Hulu periode 2021-2022, dapat disimpulkan bahwa meskipun aspek kebijakan telah memenuhi standar ideal melalui Perbup No. 2/2021 dan pembentukan TPPS dengan mekanisme Rembuk Stunting, implementasi di lapangan menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Arsitektur kebijakan yang tertata ditunjukkan melalui koordinasi vertikal-horizontal yang optimal dan inovasi integrasi program BPJS serta ODF. Namun, efektivitas implementasi terkendala oleh tiga masalah utama: diskoneksi komunikasi dalam proses penganggaran antara Bappeda dan BPKD, kapasitas kader posyandu yang terbatas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program intervensi gizi. Ketidaksesuaian mekanisme anggaran mengakibatkan keterlambatan penyerapan dana dan ketidaksinkronan program, sementara keterbatasan kader mempengaruhi kualitas pemantauan pertumbuhan balita.

Berdasarkan temuan ini, disarankan langkah strategis: integrasi BPKD ke dalam TPPS sebagai koordinator anggaran, pelatihan berkala kader posyandu mengenai pemantauan gizi dan komunikasi efektif dengan melibatkan tokoh masyarakat, pengembangan sistem pelacakan anggaran digital, percepatan integrasi data EPPGBM dengan sistem terpusat, serta evaluasi bulanan berbasis outcome oleh TPPS kabupaten. Dengan implementasi rekomendasi ini, sinergisitas penurunan stunting diharapkan dapat mencapai target prevalensi di bawah 14% secara berkelanjutan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan dan ketimpangan gizi di masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. laras. (2019). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024* (1 ed.). Jakarta Pusat: Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Almakki, M. H., Hidayat, M. F., Harmanto, H., & Fanida, E. H. (2025). Kolaborasi Penta Helix Sebagai Optimalisasi Potensi Lokal Udang Vaname di Desa Tambak Kalisogo Sidoarjo. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 1039–1053.
- BKKBN. (2021). Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021. *Kementerian Kesehatan RI*, 69(555), 1–53.
- Bupati Rokan Hulu. (2021). Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*, 1–70.
- Daniel, C. I. (2024). Exploring The Synergy Between Management And Marketing: A Strategic Paradigm. *Annals of Constantin Brancusi'University of Targu-Jiu. Economy Series/Analele Universității 'Constantin Brâncuși'din Târgu-Jiu Seria Economie*, (6).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Intan, F. R., Jaya, M. P. S., Sinaga, S. I., Andriana, D., Padilah, P., Novianti, R., & Sopyanti, S. (2023). Literasi Stunting Untuk Anak Usia Dini Di TK Melati Terpadu Kabupaten Ogan Ilir. *Akm: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 337–346.
- KPPN/ BPPN. (2019). *Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Kota Aksi 1,2,3*. 978–979.
- Lestari, T. R. P. (2025). Evaluasi Kebijakan dan Strategi Penurunan Angka Stunting pada Tahun 2024 Evaluation of Policies and Strategies for Reducing Stunting in 2024. *Jurnal Masalah-*

- Masalah Sosial*, 16(1), 71–86. Diambil dari <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v16i1.4800> linkonline:<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>
- Mardawati. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Neherta, N. M. (2023). *Intervensi Pencegahan Stunting (Pendekatan Terpadu untuk Mencegah Gangguan Pertumbuhan pada Anak)*. Penerbit Adab.
- Rianggara, R., & Wicaksono, F. (2024). Efektivitas Program Canting Dalam Upaya Mengurangi Angka Pertumbuhan Stunting Di Desa Songka Kecamatan Batu Sopang. *Journal Publicuho*, 7(1), 363–370. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.369>
- Setiawan, Andi, & Muttaqin, R. (2023). Sinergitas Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kasus Stunting Di Kota Serang. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 169–186. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17388>
- Setiawan, Ari, & Indriani, D. (2025). Program Buna Sehat sebagai Strategi Promosi Kesehatan Partisipatif untuk Pencegahan Stunting. *Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 82–94. Diambil dari <https://doi.org/10.51544/jmkm.v10i1.5973>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, D. S. (2019). Sinergitas Antar Kementerian dan Lembaga Guna Meningkatkan Program Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Sesuai Inpres No.6 tahun 2018. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v2i1.10020>